

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai Produksi Perikanan Tangkap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di 6 Kabupaten Pesisir Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai produksi perikanan tangkap belum tentu diikuti oleh peningkatan konsumsi, dikarenakan adanya faktor biaya operasional, fluktuasi musim, dan ketidakstabilan pendapatan nelayan.
2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di 6 Kabupaten Pesisir Jawa Barat. Peningkatan jumlah pelaku perikanan tidak secara langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena terdapat keterbatasan sumber daya dan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di 6 Kabupaten Pesisir Jawa Barat. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pengeluaran konsumsi rumah tangga karena berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di 6 Kabupaten Pesisir Jawa Barat. Kenaikan UMK mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir, seperti pengembangan usaha non-perikanan dan industri pengolahan

hasil laut, guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor perikanan tangkap yang bersifat fluktuatif.

2. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap melalui penyediaan sarana produksi, teknologi penangkapan, akses permodalan, dan perluasan akses pasar agar hasil produksi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan, khususnya di wilayah pesisir, guna menekan tingkat pengangguran terbuka yang terbukti berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga.
4. Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) perlu terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak, serta diimbangi dengan pengawasan implementasi agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.